



IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH OLEH DINAS CIPTA KARYA BINA KONSTRUKSI DAN TATA RUANG TENTANG PELAYANAN PEMAKAMAN UMUM (STUDI KASUS PEMAKAMAN WILAYAH II DI KOTA BANDUNG)

Ago Irsan Fauzi¹⁾

1) Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Jenderal Achmad Yani, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam pelayanan pemakaman umum yang dilaksanakan oleh Dinas Cipta Karya Bina Konstruksi dan Tata Ruang melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Pemakaman Wilayah II Kota Bandung. Latar belakang penelitian ini adalah belum optimalnya pelayanan pemakaman umum meskipun telah ditetapkan peraturan daerah yang mengatur pelayanan tersebut. Permasalahan yang ditemukan meliputi keterbatasan lahan pemakaman, keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana, lemahnya komunikasi kebijakan, serta ketidaksesuaian antara ketentuan kebijakan dan praktik di lapangan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam dengan informan kunci, dan studi dokumentasi. Analisis implementasi kebijakan difokuskan pada aspek komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pelayanan pemakaman umum di Wilayah II Kota Bandung belum berjalan secara optimal. Hambatan utama meliputi kurang efektifnya komunikasi kebijakan, keterbatasan sumber daya dan fasilitas, sikap pelaksana yang belum sepenuhnya mendukung kebijakan, serta struktur birokrasi yang belum efisien. Adapun faktor pendukungnya adalah kejelasan regulasi, komitmen aparatur, dan dukungan masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peningkatan kualitas pelayanan pemakaman umum memerlukan penguatan komunikasi kebijakan, peningkatan kapasitas sumber daya, dan perbaikan koordinasi birokrasi.

Kata Kunci: implementasi kebijakan publik, pelayanan pemakaman umum, pemerintah daerah, pelayanan publik.

Abstract

This study aims to analyze the implementation of local government policy on public cemetery services carried out by the Department of Public Works for Human Settlements, Construction Development, and Spatial Planning through the Technical Implementation Unit for Cemetery Management of Region II in Bandung City. The background of this research is the suboptimal performance of public cemetery services despite the enactment of a local regulation governing such services. The identified problems include limited cemetery land availability, inadequate human resources and facilities, ineffective policy communication, and discrepancies between policy provisions and practices in the field. This study employs a qualitative method with a descriptive approach. Data were collected through field observations, in-depth interviews with key informants, and documentation studies. Policy implementation was analyzed by examining aspects of communication, resources, implementer disposition, and bureaucratic structure. The results indicate that the implementation of public cemetery service policies in Region II of Bandung City has not been fully optimal. The main obstacles include ineffective policy communication, limited human resources and facilities, implementers' attitudes that do not fully support policy objectives, and an inefficient bureaucratic structure. Supporting factors include clear regulations, commitment of government officials, and community support. This study concludes that improving the quality of public cemetery services requires strengthening policy communication, enhancing resource capacity, and improving bureaucratic coordination to achieve effective, transparent, and accountable services.

Keywords: *public policy implementation, public cemetery services, local government, public service.*

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, yang memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat. Penerapan otonomi daerah tidak hanya dimaksudkan sebagai pelimpahan kewenangan administratif, tetapi juga sebagai instrumen demokratisasi yang menempatkan pemerintah daerah sebagai aktor utama dalam penyediaan pelayanan publik. Kerangka tersebut ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, yang menegaskan bahwa keberhasilan otonomi daerah sangat bergantung pada kemampuan daerah dalam merumuskan dan

mengimplementasikan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dalam konteks otonomi daerah, pelayanan publik menjadi indikator utama dalam menilai kinerja dan legitimasi pemerintah daerah. Pelayanan publik tidak hanya dipahami sebagai pemenuhan kebutuhan administratif masyarakat, tetapi juga sebagai perwujudan tanggung jawab negara dalam menjamin hak-hak dasar warga negara. Salah satu bentuk pelayanan publik yang bersifat esensial namun sering kali kurang memperoleh perhatian yang memadai adalah pelayanan pemakaman umum. Pemakaman merupakan kebutuhan sosial yang tidak terelakkan, yang berkaitan erat dengan nilai kemanusiaan, budaya, dan martabat manusia. Selain itu, kawasan pemakaman juga memiliki fungsi ekologis sebagai ruang terbuka hijau dan daerah resapan air, sehingga pengelolaannya menuntut kebijakan publik yang terencana dan berkelanjutan.

Kota Bandung sebagai kota metropolitan dan ibu kota Provinsi Jawa Barat menghadapi tantangan yang semakin kompleks dalam penyelenggaraan pelayanan pemakaman umum. Pertumbuhan penduduk yang pesat, tingginya arus urbanisasi, serta masifnya pembangunan kawasan perumahan dan infrastruktur perkotaan telah menyebabkan semakin terbatasnya ketersediaan lahan pemakaman. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada meningkatnya kebutuhan layanan pemakaman, tetapi juga menimbulkan persoalan tata ruang, lingkungan, dan kesehatan masyarakat. Menyikapi kondisi tersebut, Pemerintah Kota Bandung menetapkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pelayanan Pemakaman Umum sebagai instrumen kebijakan untuk menjamin hak masyarakat atas pelayanan pemakaman yang layak, terstandarisasi, inklusif, dan bebas biaya.

Secara normatif, peraturan daerah tersebut menegaskan kewajiban pemerintah daerah, melalui Dinas Cipta Karya Bina Konstruksi dan Tata Ruang, untuk menyediakan taman pemakaman umum yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa

membedakan latar belakang sosial maupun keagamaan. Namun demikian, realitas implementasi kebijakan di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan kebijakan dan praktik pelayanan yang dirasakan oleh masyarakat. Berbagai keluhan masih muncul, terutama terkait keterbatasan lahan pemakaman, prosedur administrasi yang dinilai berbelit, serta dugaan praktik pungutan liar dalam layanan pemakaman, meskipun pemerintah daerah telah menetapkan bahwa seluruh layanan pemakaman bersifat non-retribusi.

Fenomena tersebut mengindikasikan adanya persoalan serius dalam proses implementasi kebijakan. Dalam kerangka teori implementasi kebijakan, komunikasi merupakan faktor kunci yang menentukan keberhasilan suatu kebijakan, karena kebijakan hanya dapat dilaksanakan secara efektif apabila substansi dan tujuan kebijakan dipahami secara jelas oleh pelaksana maupun masyarakat sasaran (Edwards, 1980). Lemahnya sosialisasi dan tidak konsistennya distribusi informasi kebijakan berpotensi menimbulkan kebingungan di tingkat masyarakat, sekaligus membuka ruang bagi terjadinya penyimpangan oleh oknum pelaksana.

Selain faktor komunikasi, keterbatasan sumber daya juga menjadi hambatan struktural dalam pelayanan pemakaman umum. Ketersediaan sumber daya manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana yang tidak sebanding dengan luas dan kompleksitas pengelolaan pemakaman berdampak langsung pada rendahnya kualitas pelayanan. Ketidakseimbangan antara beban kerja dan jumlah petugas lapangan menunjukkan bahwa kebijakan yang dirumuskan secara normatif tidak selalu diikuti dengan dukungan sumber daya yang memadai. Kondisi ini sejalan dengan pandangan bahwa keterbatasan sumber daya merupakan salah satu faktor utama kegagalan implementasi kebijakan di tingkat lokal (Goggin et al., 1990).

Permasalahan implementasi kebijakan juga tidak terlepas dari disposisi pelaksana dan struktur birokrasi yang mengelolanya.

Disposisi pelaksana mencerminkan tingkat komitmen, integritas, dan kesediaan aparatur untuk melaksanakan kebijakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sikap pelaksana yang tidak selaras dengan nilai dan tujuan kebijakan dapat melemahkan efektivitas implementasi, bahkan ketika regulasi telah disusun dengan baik (Edwards, 1980). Di sisi lain, struktur birokrasi yang kurang efisien, minim koordinasi, dan lambat merespons dinamika lapangan turut memperumit pelaksanaan kebijakan pelayanan pemakaman umum. Struktur birokrasi yang terlalu hierarkis dan tidak adaptif cenderung menjadi penghambat dalam implementasi kebijakan pelayanan dasar (Grindle, 1980).

Berdasarkan kompleksitas permasalahan tersebut, implementasi kebijakan pelayanan pemakaman umum di Kota Bandung menjadi isu penting untuk dikaji secara mendalam. Penelitian ini berfokus pada implementasi kebijakan pemerintah daerah oleh Dinas Cipta Karya Bina Konstruksi dan Tata Ruang dalam penyelenggaraan pelayanan pemakaman umum di Wilayah II Kota Bandung. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara komprehensif proses implementasi kebijakan tersebut, serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan faktor-faktor pendukung yang memengaruhi pelaksanaannya. Melalui kajian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika implementasi kebijakan pelayanan pemakaman umum, sekaligus menghasilkan rekomendasi yang kontekstual dan aplikatif bagi perbaikan kualitas pelayanan publik di tingkat daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam implementasi kebijakan pelayanan pemakaman umum dalam konteks nyata penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan proses, interaksi, serta dinamika pelaksanaan kebijakan yang tidak dapat dijelaskan secara

kuantitatif, terutama yang berkaitan dengan perilaku aparatur dan respons masyarakat terhadap kebijakan publik (Sugiyono, 2019).

Objek penelitian adalah implementasi kebijakan pelayanan pemakaman umum yang dilaksanakan oleh Dinas Cipta Karya Bina Konstruksi dan Tata Ruang Kota Bandung, dengan fokus pada UPTD Pengelolaan Pemakaman Wilayah II Kota Bandung. Unit analisis penelitian ini adalah proses pelaksanaan kebijakan, yang mencakup mekanisme pelayanan, koordinasi antarunit kerja, serta praktik pelayanan pemakaman yang berlangsung di lapangan.

Penentuan informan dilakukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan keterlibatan langsung, kewenangan, serta pengetahuan informan terhadap kebijakan yang diteliti. Informan dalam penelitian ini meliputi pejabat struktural pada Dinas Cipta Karya Bina Konstruksi dan Tata Ruang, pengelola UPTD Pemakaman Wilayah II, petugas lapangan pemakaman, serta masyarakat sebagai pengguna layanan pemakaman umum.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan non-partisipatif, dan studi dokumentasi. Wawancara digunakan untuk menggali persepsi dan pengalaman informan, observasi untuk mengamati langsung proses pelayanan dan kondisi fasilitas pemakaman, sedangkan dokumentasi berfungsi sebagai data pendukung berupa peraturan daerah, standar operasional prosedur, dan laporan terkait.

Analisis implementasi kebijakan dalam penelitian ini menggunakan model George C. Edwards III, yang menitikberatkan pada empat dimensi utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Keempat dimensi tersebut digunakan sebagai variabel analitis untuk menilai sejauh mana kebijakan pelayanan pemakaman umum diimplementasikan secara efektif di tingkat operasional (Edwards, 1980). Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk menjamin keabsahan data,

penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode, sehingga temuan penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan mencerminkan kondisi empiris implementasi kebijakan pelayanan pemakaman umum di Kota Bandung.

PEMBAHASAN

Implementasi kebijakan Pemerintah Daerah oleh Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Kota Bandung dalam pelayanan pemakaman umum di Wilayah II Kota Bandung, dengan merujuk pada Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pelayanan Pemakaman Umum. Analisis dilakukan dengan mengaitkan temuan empiris hasil penelitian dengan kerangka teori implementasi kebijakan George C. Edwards III yang menekankan empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi.

Secara normatif, Perda Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2023 telah menetapkan pelayanan pemakaman sebagai layanan dasar yang bersifat non-retribusi, inklusif, dan menjunjung prinsip keadilan sosial. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tersebut di Pemakaman Wilayah II belum sepenuhnya berjalan optimal. Terdapat kesenjangan antara tujuan kebijakan dengan praktik pelayanan di lapangan, yang ditandai oleh masih terbatasnya pemahaman masyarakat terhadap kebijakan, keluhan terhadap prosedur pelayanan, serta munculnya indikasi penyimpangan dalam pelaksanaan layanan.

Dari aspek komunikasi, sosialisasi kebijakan pelayanan pemakaman belum dilakukan secara efektif dan berkelanjutan. Informasi mengenai hak masyarakat atas pelayanan pemakaman gratis belum tersampaikan secara merata, baik kepada masyarakat sebagai pengguna layanan maupun kepada petugas sebagai pelaksana kebijakan. Kondisi ini mengakibatkan terjadinya perbedaan pemahaman dan membuka ruang terjadinya distorsi kebijakan di tingkat implementasi. Dalam perspektif Edwards III,

lemahnya komunikasi merupakan faktor krusial yang dapat menghambat keberhasilan implementasi kebijakan publik.

Dari aspek sumber daya, penelitian menemukan adanya keterbatasan jumlah sumber daya manusia, sarana prasarana, serta ketersediaan lahan pemakaman. Ketidakseimbangan antara beban kerja petugas dengan luas wilayah pelayanan berdampak pada kurang optimalnya kualitas layanan, baik dari segi kecepatan, ketertiban administrasi, maupun pemeliharaan lingkungan pemakaman. Hal ini menegaskan bahwa keterbatasan sumber daya menjadi faktor penghambat utama dalam pelaksanaan kebijakan, sebagaimana ditegaskan oleh Edwards III bahwa kebijakan yang baik memerlukan dukungan sumber daya yang memadai agar dapat berjalan efektif.

Aspek disposisi pelaksana juga berpengaruh signifikan terhadap implementasi kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komitmen dan integritas pelaksana belum sepenuhnya seragam. Masih terdapat pelaksana yang belum sepenuhnya menjadikan prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagai landasan dalam memberikan pelayanan. Kondisi ini berpotensi menurunkan kualitas pelayanan publik dan mencederai tujuan kebijakan pelayanan pemakaman yang bermartabat dan bebas dari praktik pungutan liar.

Selanjutnya, dari aspek struktur birokrasi, secara formal telah terdapat pembagian tugas dan kewenangan antara Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang dengan UPTD Pengelolaan Pemakaman Wilayah II. Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi antarunit kerja belum berjalan secara optimal. Lemahnya sinkronisasi data, mekanisme pengawasan yang belum konsisten, serta prosedur pelayanan yang kurang adaptif menyebabkan respons pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat menjadi kurang efektif.

Berdasarkan keempat variabel implementasi kebijakan menurut George C. Edwards III, dapat disimpulkan bahwa

implementasi kebijakan pelayanan pemakaman umum di Wilayah II Kota Bandung masih menghadapi berbagai hambatan struktural dan operasional. Hambatan tersebut meliputi lemahnya komunikasi kebijakan, keterbatasan sumber daya, disposisi pelaksana yang belum sepenuhnya mendukung tujuan kebijakan, serta struktur birokrasi yang belum bekerja secara efektif. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh kapasitas organisasi dan perilaku pelaksana dalam menjalankan kebijakan di tingkat lapangan. Dalam kaitan dengan skripsi ini yang berjudul “Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Oleh Dinas Cipta Karya Bina Konstruksi dan Tata Ruang Tentang Pelayanan Pemakaman Umum (Studi Kasus Pemakaman Wilayah II di Kota Bandung)”, peneliti membagi menjadi 3 (tiga) sub bab pembahasan yaitu:

1. Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah di Dinas Cipta Karya Bina Konstruksi dan Tata Ruang mengenai pelayanan pemakaman umum di UPTD Pengelolaan Pemakaman Wilayah II Kota Bandung;
2. Faktor penghambat dalam Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah di Dinas Cipta Karya Bina Konstruksi dan Tata Ruang mengenai pelayanan pemakaman umum di UPTD Pengelolaan Pemakaman Wilayah II Kota Bandung; dan
3. Faktor pendukung dalam Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah di Dinas Cipta Karya Bina Konstruksi dan Tata Ruang mengenai pelayanan pemakaman umum di UPTD Pengelolaan Pemakaman Wilayah II Kota Bandung.

Berikut adalah pembahasan dari masing-masing sub bab pembahasan tersebut.

Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah di Dinas Cipta Karya Bina Konstruksi dan Tata Ruang mengenai pelayanan pemakaman umum di UPTD Pengelolaan Pemakaman Wilayah II Kota Bandung

Implementasi kebijakan pelayanan pemakaman umum di Wilayah II Kota Bandung pada dasarnya tidak hanya berkaitan dengan penyediaan lahan pemakaman, tetapi juga mencerminkan bentuk kehadiran negara dalam memenuhi hak dasar masyarakat atas pelayanan publik yang layak, bermartabat, dan berkeadilan. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, pelayanan pemakaman yang diselenggarakan oleh UPTD Pengelolaan Pemakaman Wilayah II telah berjalan secara operasional setiap hari dan mampu merespons kebutuhan masyarakat yang bersifat mendesak, khususnya pada saat terjadi kematian. Petugas pemakaman hadir langsung di lokasi dan memberikan pendampingan selama proses penguburan berlangsung, sehingga pelayanan dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat.

Dalam praktiknya menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan tujuan ideal sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pelayanan Pemakaman Umum. Meskipun secara normatif pelayanan pemakaman ditetapkan sebagai layanan gratis, hasil observasi memperlihatkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap kebijakan ini belum merata. Informasi mengenai prosedur dan ketentuan pelayanan sering kali masih ditanyakan kembali kepada petugas, yang menunjukkan adanya keterbatasan dalam proses komunikasi kebijakan kepada masyarakat pengguna layanan.

Berdasarkan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III, komunikasi merupakan variabel penting dalam memastikan kebijakan dapat dipahami dan dilaksanakan secara konsisten. Dalam konteks pelayanan pemakaman Wilayah II Kota Bandung, komunikasi kebijakan telah dilakukan melalui pemasangan papan informasi dan penjelasan langsung oleh petugas lapangan. Akan tetapi, efektivitas komunikasi tersebut belum optimal karena belum seluruh masyarakat memahami secara utuh hak dan kewajiban mereka dalam pelayanan pemakaman umum. Kondisi ini membuka

ruang terjadinya perbedaan persepsi antara pelaksana kebijakan dan masyarakat, yang berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian dalam praktik pelayanan.

Selain aspek komunikasi, implementasi kebijakan pelayanan pemakaman umum juga dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya. Data observasi menunjukkan bahwa sebagian besar TPU di Wilayah II berada dalam kondisi padat hingga hampir penuh, sehingga praktik pemakaman tumpang menjadi solusi yang dominan. Keterbatasan lahan, jumlah petugas yang terbatas, serta sarana dan prasarana yang belum sepenuhnya memadai berdampak pada kualitas penataan dan pemeliharaan lingkungan pemakaman. Dalam perspektif Edwards III, keterbatasan sumber daya merupakan faktor struktural yang dapat menghambat efektivitas implementasi kebijakan, meskipun kebijakan tersebut telah dirumuskan dengan baik.

Dari sisi disposisi atau sikap pelaksana, hasil penelitian menunjukkan bahwa petugas pemakaman pada umumnya memiliki sikap yang ramah, kooperatif, dan responsif dalam melayani masyarakat. Sikap ini mencerminkan adanya komitmen pelaksana dalam mendukung keberlangsungan pelayanan pemakaman umum. Namun demikian, praktik pemberian uang sukarela oleh masyarakat masih ditemukan di lapangan. Meskipun tidak bersifat wajib, praktik tersebut berpotensi menimbulkan persepsi negatif terhadap kebijakan pelayanan pemakaman gratis dan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik.

Struktur birokrasi pelayanan pemakaman umum di Wilayah II Kota Bandung secara formal telah ditata melalui pembagian tugas dan kewenangan antara Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang dengan UPTD Pengelolaan Pemakaman. Alur pelayanan telah ditetapkan melalui standar operasional prosedur (SOP) dan dijalankan oleh petugas di lapangan. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi antar unit kerja dan pengawasan

pelaksanaan pelayanan masih bersifat administratif dan belum sepenuhnya adaptif terhadap dinamika kondisi lapangan. Hal ini menyebabkan implementasi SOP belum optimal dalam menjawab kompleksitas permasalahan pemakaman di kawasan perkotaan yang padat.

Implementasi kebijakan pelayanan pemakaman umum di Wilayah II Kota Bandung telah berjalan secara operasional, namun belum sepenuhnya efektif dalam mencapai tujuan kebijakan sebagaimana diatur dalam Perda Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2023. Terdapat kesenjangan antara tujuan kebijakan yang menekankan pelayanan gratis, tertib, dan bermartabat dengan realitas pelaksanaan di lapangan yang masih dihadapkan pada keterbatasan komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan efektivitas struktur birokrasi. Oleh karena itu, implementasi kebijakan pelayanan pemakaman umum perlu terus diperkuat agar mampu memberikan pelayanan publik yang lebih transparan, akuntabel, dan berkeadilan bagi masyarakat. Berkaitan dengan Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah di Dinas Cipta Karya Bina Konstruksi dan Tata Ruang mengenai pelayanan pemakaman umum di UPTD Pengelolaan Pemakaman Wilayah II Kota Bandung, peneliti membahasnya berdasarkan kepada Teori Implementasi menurut George C. Edward III (1980):

1. Komunikasi;
2. Sumber Daya;
3. Disposisi (Sikap Pelaksana);
4. Struktur Birokrasi.

Berikut adalah pembahasan dari masing-masing indikator tersebut.

1. Dimensi Komunikasi

Dimensi komunikasi merupakan variabel kunci dalam teori implementasi kebijakan George C. Edwards III yang menentukan tingkat pemahaman dan konsistensi pelaksanaan kebijakan oleh pelaksana maupun masyarakat sasaran. Keberhasilan implementasi

dipengaruhi oleh kejelasan, konsistensi, dan efektivitas penyampaian informasi. Hasil observasi di UPTD Pengelolaan Pemakaman Wilayah II Kota Bandung menunjukkan bahwa komunikasi kebijakan pelayanan pemakaman umum telah dilakukan melalui papan informasi di TPU serta penjelasan langsung oleh petugas terkait prosedur dan kebijakan pemakaman gratis. Namun, informasi tersebut belum sepenuhnya dipahami secara merata oleh masyarakat, yang mengindikasikan bahwa sosialisasi kebijakan, alur informasi antar pelaksana, serta pemahaman petugas terhadap Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2023 masih perlu diperkuat agar implementasi kebijakan dapat berjalan lebih efektif. Berkaitan dengan hal tersebut peneliti menetapkan indikator sebagai berikut:

- a. Sosialisasi kebijakan;
- b. Alur informasi antar pelaksana;
- c. Pemahaman petugas terhadap Perda No. 5 Tahun 2023.

Berikut adalah pembahasan dari masing-masing indikator tersebut.

a. Sosialisasi Kebijakan

Sosialisasi kebijakan pelayanan pemakaman umum di Wilayah II Kota Bandung telah dilaksanakan secara berjenjang dan menunjukkan adanya upaya serius dari pemerintah daerah. Namun, dari perspektif implementasi kebijakan Edward III, sosialisasi tersebut belum sepenuhnya efektif dalam menciptakan keseragaman pemahaman dan perilaku pelaksana serta masyarakat. Kesenjangan pemahaman antar petugas, ketergantungan pada komunikasi lisan, dan belum optimalnya pemanfaatan media informasi menunjukkan bahwa dimensi komunikasi masih menjadi titik lemah dalam implementasi kebijakan. Oleh karena itu, penguatan sosialisasi kebijakan secara berkelanjutan, terstruktur, dan berbasis media yang mudah diakses menjadi kebutuhan mendesak agar tujuan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2023 dapat tercapai secara optimal dan konsisten.

b. Alur Informasi Antar Pelaksana

Alur informasi antar pelaksana dalam implementasi kebijakan pelayanan pemakaman umum di Wilayah II Kota Bandung telah terbentuk secara jelas dan berjenjang sesuai dengan mekanisme birokrasi yang berlaku. Penempatan UPTD sebagai penghubung utama antara dinas dan petugas lapangan memberikan kejelasan jalur komunikasi dan pembagian peran antar pelaksana. Namun, dalam perspektif teori implementasi kebijakan George C. Edward III, efektivitas alur informasi masih sangat bergantung pada komunikasi lisan dan intensitas koordinasi internal. Ketergantungan tersebut berpotensi menimbulkan inkonsistensi pelaksanaan kebijakan apabila tidak diimbangi dengan penguatan dokumentasi tertulis dan mekanisme komunikasi yang lebih sistematis. Oleh karena itu, penguatan alur informasi menjadi kebutuhan mendesak agar implementasi kebijakan pelayanan pemakaman umum dapat berjalan konsisten dan sesuai dengan tujuan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2023.

c. Pemahaman petugas terhadap Perda No. 5 Tahun 2023.

Pemahaman petugas terhadap Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2023 didefinisikan sebagai tingkat pengetahuan dan penguasaan pelaksana kebijakan terhadap substansi kebijakan pelayanan pemakaman umum, yang meliputi tujuan kebijakan, ketentuan pelayanan pemakaman gratis, serta prosedur teknis pelaksanaan di lapangan. Dalam perspektif teori implementasi kebijakan George C. Edward III, pemahaman pelaksana merupakan bagian penting dari dimensi komunikasi, karena menentukan sejauh mana kebijakan dapat diterjemahkan secara tepat ke dalam praktik pelayanan publik.

Peneliti menyimpulkan bahwa pemahaman petugas lapangan di TPU Ciburuy, TPU Gumuruh, TPU Maleer, dan TPU Rancacili terhadap Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2023 tergolong cukup baik pada aspek implementatif, khususnya terkait penghapusan biaya pelayanan pemakaman umum. Namun,

pemahaman tersebut masih didominasi oleh aspek praktis dan belum sepenuhnya mencerminkan penguasaan menyeluruh terhadap seluruh substansi kebijakan. Dalam perspektif teori implementasi kebijakan George C. Edward III, kondisi ini menunjukkan bahwa dimensi komunikasi kebijakan belum sepenuhnya menghasilkan internalisasi kebijakan yang komprehensif di tingkat pelaksana. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pemahaman melalui pembinaan, sosialisasi lanjutan, dan internalisasi regulasi secara berkelanjutan agar implementasi kebijakan pelayanan pemakaman umum dapat berjalan lebih konsisten dan sesuai dengan tujuan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2023.

2. Dimensi Sumber Daya

Dimensi sumber daya merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan implementasi kebijakan publik sebagaimana dikemukakan oleh George C. Edwards III. Sumber daya tidak hanya dimaknai sebagai ketersediaan anggaran, tetapi juga mencakup sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta dukungan administratif yang menunjang pelaksanaan kebijakan di tingkat operasional. Tanpa dukungan sumber daya yang memadai, kebijakan yang telah dirumuskan dengan baik berpotensi tidak dapat diimplementasikan secara optimal di lapangan. Berkaitan dengan hal tersebut peneliti menetapkan indikator sebagai berikut:

- a. Ketersediaan SDM;
- b. Sarana dan Prasarana;
- c. Kapasitas dan Kompetensi Pelaksana.

Berikut adalah pembahasan dari masing-masing indikator tersebut.

a. Ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM)

Ketersediaan sumber daya manusia dalam implementasi kebijakan pelayanan pemakaman umum di Wilayah II Kota Bandung masih menghadapi keterbatasan, terutama dari aspek jumlah petugas. Meskipun demikian, petugas lapangan menunjukkan komitmen dan tanggung jawab yang tinggi dalam memberikan

pelayanan kepada masyarakat. Dalam perspektif teori George C. Edwards III, keterbatasan sumber daya manusia ini merupakan salah satu faktor penghambat implementasi kebijakan yang berpotensi memengaruhi kualitas dan keberlanjutan pelayanan apabila tidak segera ditangani. Oleh karena itu, penguatan dimensi sumber daya manusia melalui penambahan personel, penataan beban kerja, atau optimalisasi manajemen SDM menjadi kebutuhan penting agar implementasi kebijakan pelayanan pemakaman umum dapat berjalan sesuai dengan tujuan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2023.

b. Sarana dan Prasarana

Ketersediaan sarana dan prasarana dalam implementasi kebijakan pelayanan pemakaman umum di Wilayah II Kota Bandung secara umum telah tersedia dan dapat digunakan untuk mendukung pelayanan. Namun, keterbatasan kualitas sarana, kondisi lahan yang padat, serta akses prasarana yang belum optimal masih menjadi kendala yang memengaruhi efektivitas pelayanan. Dalam perspektif teori George C. Edwards III, kondisi ini menunjukkan bahwa dimensi sumber daya belum sepenuhnya mendukung implementasi kebijakan secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan upaya peremajaan sarana dan penataan prasarana lingkungan TPU secara berkelanjutan agar implementasi kebijakan pelayanan pemakaman umum dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan .

c. Kapasitas dan Kompetensi Pelaksana

Kapasitas dan kompetensi pelaksana dalam implementasi kebijakan pelayanan pemakaman umum di Wilayah II Kota Bandung secara umum telah memadai untuk mendukung pelaksanaan pelayanan. Petugas lapangan memiliki pemahaman tugas dan kemampuan adaptasi yang cukup baik terhadap kondisi lapangan. Namun, perbedaan tingkat pengalaman serta belum adanya pelatihan yang terstruktur menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas pelaksana masih perlu diperkuat agar kualitas pelayanan pemakaman umum dapat berjalan lebih merata dan berkelanjutan

sesuai dengan tujuan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2023.

3. Dimensi Disposisi (Sikap Pelaksana)

Dimensi disposisi atau sikap pelaksana merupakan faktor implementatif yang bersifat internal namun memiliki pengaruh yang sangat menentukan terhadap keberhasilan kebijakan publik. Dalam perspektif implementasi kebijakan George C. Edwards III, disposisi dipahami sebagai kecenderungan sikap, komitmen, dan orientasi perilaku para pelaksana kebijakan dalam menerima, menafsirkan, serta menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan. Disposisi tidak hanya berkaitan dengan kesediaan pelaksana untuk mematuhi aturan, tetapi juga mencerminkan sejauh mana pelaksana memiliki komitmen moral dan profesional dalam mewujudkan tujuan kebijakan di tingkat operasional. Berkaitan dengan hal tersebut peneliti menetapkan indikator sebagai berikut:

- a. Komitmen pelaksana;
- b. Kepatuhan terhadap prosedur;
- c. Kepedulian terhadap warga.

Berikut adalah pembahasan dari masing-masing indikator tersebut.

a. Komitmen pelaksana

Komitmen pelaksana dalam implementasi kebijakan pelayanan pemakaman umum di Kota Bandung tergolong cukup baik. Komitmen tersebut tercermin dari kesediaan petugas lapangan di TPU Wilayah II Ciburuy, Gumuruh, Maleer, dan Rancacili untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung, menjelaskan persyaratan administrasi pemakaman, serta memberikan informasi mengenai kebijakan pemakaman gratis sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penilaian masyarakat pengguna layanan juga menunjukkan bahwa pelayanan pemakaman dinilai cukup membantu dan sesuai harapan, meskipun masih terdapat keluhan terkait kondisi lingkungan TPU, keterbatasan lahan, kebersihan, dan kerapian.

Kondisi tersebut berdampak pada beban kerja petugas yang terlihat cukup berat, namun tidak mengurangi upaya mereka dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, komitmen pelaksana yang telah terbentuk perlu didukung dengan peningkatan sumber daya dan penataan lingkungan kerja agar implementasi kebijakan pelayanan pemakaman umum dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.

b. Kepatuhan terhadap prosedur

Kepatuhan pelaksana terhadap prosedur dalam implementasi kebijakan pelayanan pemakaman umum di Wilayah II Kota Bandung tergolong cukup baik. Petugas lapangan telah berupaya melaksanakan pelayanan sesuai dengan ketentuan administratif dan teknis yang berlaku. Namun, keterbatasan sumber daya dan kondisi lahan pemakaman yang padat masih menjadi faktor yang memengaruhi optimalisasi penerapan prosedur secara konsisten di seluruh wilayah TPU.

c. Kepedulian terhadap warga

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti menyimpulkan sementara bahwa kepedulian pelaksana terhadap warga dalam implementasi kebijakan pelayanan pemakaman umum di Wilayah II Kota Bandung tergolong cukup baik. Petugas lapangan menunjukkan sikap empati, kesabaran, dan perhatian terhadap masyarakat yang sedang berduka. Namun, keterbatasan sumber daya manusia dan kondisi fisik TPU masih menjadi faktor yang memengaruhi optimalisasi kepedulian pelaksana secara konsisten di seluruh wilayah pelayanan.

4. Dimensi Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi merupakan dimensi penting dalam model implementasi kebijakan George C. Edwards III karena berkaitan dengan pembagian tugas, kewenangan, serta mekanisme koordinasi dalam pelaksanaan kebijakan. Dalam pelayanan pemakaman umum di Wilayah II Kota Bandung, struktur birokrasi melibatkan Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Kota Bandung sebagai

instansi teknis, UPTD Pemakaman Wilayah II sebagai pelaksana operasional, serta petugas lapangan TPU sebagai pelaksana teknis di lapangan. Berkaitan dengan hal tersebut peneliti menetapkan indikator sebagai berikut:

- a. Kejelasan SOP;
- b. Koordinasi antar unit kerja;
- c. Pengawasan & evaluasi.

Berikut adalah pembahasan dari masing-masing indikator tersebut.

a. Kejelasan SOP

Kejelasan SOP dalam dimensi struktur birokrasi pelayanan pemakaman umum di Kota Bandung tergolong baik. SOP telah tersedia, dipahami oleh pelaksana kebijakan pada tingkat struktural, serta menjadi pedoman dalam pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi pelayanan pemakaman umum sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2023. Namun dalam realitanya, keterbatasan kondisi lapangan, khususnya keterbatasan lahan pemakaman, menuntut adanya penyesuaian teknis dalam penerapan SOP agar tetap dapat dilaksanakan secara efektif dan konsisten. Oleh karena itu, meskipun secara normatif struktur birokrasi telah mendukung implementasi kebijakan, penguatan penerapan SOP di tingkat operasional masih diperlukan agar pelayanan pemakaman umum dapat berjalan lebih tertib, adil, dan berkelanjutan.

b. Koordinasi antar unit kerja

Koordinasi antar unit kerja dalam struktur birokrasi pelayanan pemakaman umum di Kota Bandung tergolong cukup baik. Koordinasi antara Dinas dan UPTD telah berjalan secara rutin, berjenjang, dan fungsional, terutama dalam pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana serta penanganan persoalan lapangan. Meskipun demikian, efektivitas koordinasi tetap bergantung pada ketersediaan anggaran dan kapasitas institusional dalam menindaklanjuti setiap kebutuhan yang muncul.

c. Pengawasan & Evaluasi

Pengawasan dan evaluasi dalam dimensi struktur birokrasi pelayanan pemakaman umum di Kota Bandung telah berjalan melalui mekanisme internal dan kontrol publik. Sistem pelaporan, pemanfaatan media sosial, koordinasi berjenjang antara UPTD dan Dinas, serta keterlibatan masyarakat menjadi instrumen utama dalam pengawasan implementasi kebijakan. Optimalisasi tindak lanjut hasil evaluasi dan penguatan kapasitas pengawasan masih diperlukan agar mekanisme pengawasan tidak hanya bersifat formal, tetapi benar-benar mampu mendorong perbaikan pelayanan secara konsisten. Dengan pengawasan dan evaluasi yang lebih efektif, implementasi kebijakan pelayanan pemakaman umum di Kota Bandung diharapkan dapat berjalan lebih optimal, akuntabel, dan berkelanjutan sesuai dengan tujuan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2023.

Faktor penghambat dalam Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah di Dinas Cipta Karya Bina Konstruksi dan Tata Ruang mengenai pelayanan pemakaman umum di UPTD Pengelolaan Pemakaman Wilayah II Kota Bandung

Berdasarkan hasil penelitian di Dinas Cipta Karya Bina Konstruksi dan Tata Ruang melalui UPTD Pengelolaan Pemakaman Wilayah II Kota Bandung, implementasi kebijakan pelayanan pemakaman umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2023 masih menghadapi sejumlah faktor penghambat yang saling berkaitan. Hambatan tersebut meliputi keterbatasan sumber daya manusia, kondisi sarana dan prasarana TPU yang padat hingga hampir penuh, serta kondisi fisik lingkungan pemakaman yang kurang mendukung kelancaran pelayanan. Jumlah petugas lapangan belum sebanding dengan beban kerja, terutama di TPU dengan tingkat kepadatan tinggi, sementara petugas juga harus menangani berbagai fungsi pelayanan sekaligus. Selain itu, keterbatasan akses jalan, drainase, dan fasilitas pendukung turut memengaruhi kenyamanan serta efektivitas proses

pelayanan pemakaman, terutama dalam kondisi cuaca tertentu. Di sisi lain, faktor sosial masyarakat berupa keterbatasan pemahaman terhadap prosedur dan alur pelayanan juga menambah kompleksitas pelaksanaan kebijakan di lapangan.

Dalam kerangka teori implementasi kebijakan George C. Edwards III, hasil penelitian menunjukkan bahwa dimensi komunikasi dan disposisi pelaksana cenderung telah berjalan cukup baik, tercermin dari pemahaman kebijakan dan komitmen petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Namun, hambatan implementasi lebih dominan bersumber dari dimensi sumber daya dan struktur birokrasi, khususnya terkait keterbatasan jumlah petugas, belum optimalnya sarana dan prasarana pendukung, serta mekanisme koordinasi dan evaluasi yang masih bersifat administratif dan kurang adaptif terhadap dinamika lapangan. Kondisi ini berpotensi menghambat efektivitas implementasi kebijakan meskipun regulasi telah dirumuskan dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sumber daya manusia, perbaikan sarana dan prasarana, serta penyesuaian kebijakan teknis dan mekanisme birokrasi yang lebih responsif agar implementasi kebijakan pelayanan pemakaman umum dapat berjalan secara lebih efektif, konsisten, dan berkeadilan sesuai dengan tujuan Perda Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2023.

Faktor pendukung dalam Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah di Dinas Cipta Karya Bina Konstruksi dan Tata Ruang mengenai pelayanan pemakaman umum di UPTD Pengelolaan Pemakaman Wilayah II Kota Bandung

Berdasarkan hasil penelitian di UPTD Pengelolaan Pemakaman Wilayah II Kota Bandung, selain faktor penghambat, terdapat sejumlah faktor pendukung yang berperan penting dalam menjaga keberlangsungan implementasi kebijakan pelayanan pemakaman umum. Faktor pendukung utama terletak pada komitmen dan sikap pelaksana kebijakan, yang ditunjukkan melalui orientasi pelayanan

publik, sikap ramah, kesabaran, serta kesigapan petugas dalam melayani masyarakat yang berada dalam kondisi berduka. Komitmen ini menjadi modal utama dalam menjaga kualitas pelayanan di tengah keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta kondisi lahan pemakaman yang padat. Selain itu, kejelasan regulasi dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang bersumber dari Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2023 memberikan kepastian hukum dan pedoman teknis bagi pelaksana kebijakan, sehingga pelayanan dapat dijalankan secara lebih terarah, konsisten, dan relatif seragam antar wilayah TPU.

Faktor pendukung lainnya adalah dukungan kelembagaan melalui koordinasi berjenjang antara UPTD dan Dinas terkait, yang memungkinkan penyampaian kondisi lapangan, kebutuhan operasional, serta kendala pelayanan secara struktural. Meskipun koordinasi tersebut masih bersifat administratif, dukungan kelembagaan ini tetap berkontribusi terhadap kesinambungan pelayanan pemakaman umum. Di sisi lain, penerimaan dan respons positif masyarakat terhadap sikap serta kinerja petugas turut memperkuat kepercayaan publik dan menciptakan hubungan yang kooperatif antara penyelenggara dan pengguna layanan. Dalam perspektif teori implementasi kebijakan George C. Edwards III, faktor-faktor pendukung tersebut mencerminkan sinergi antara dimensi disposisi, struktur birokrasi, komunikasi, dan sumber daya, yang secara bersama-sama menopang implementasi kebijakan pelayanan pemakaman umum agar tetap berjalan secara relatif stabil dan berkelanjutan sesuai dengan tujuan Perda Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2023.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan pelayanan pemakaman umum di Wilayah II Kota Bandung sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2023 telah dilaksanakan dan mampu

menjamin keberlangsungan pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam situasi kedaruratan akibat kematian. Kebijakan ini didukung oleh kejelasan regulasi, struktur birokrasi yang telah terbentuk, serta komitmen dan sikap pelaksana kebijakan yang menunjukkan orientasi pelayanan publik. Namun demikian, efektivitas implementasi kebijakan belum sepenuhnya optimal karena masih dihadapkan pada keterbatasan sumber daya manusia, kondisi sarana dan prasarana pemakaman yang belum memadai, serta keterbatasan lahan yang berdampak pada kompleksitas pelayanan di lapangan. Dalam perspektif teori implementasi kebijakan George C. Edwards III, kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun dimensi komunikasi, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi telah berfungsi dengan cukup baik, keterbatasan pada dimensi sumber daya masih menjadi faktor dominan yang menghambat optimalisasi pelaksanaan kebijakan. Oleh karena itu, implementasi kebijakan pelayanan pemakaman umum di Wilayah II Kota Bandung memerlukan penguatan kapasitas sumber daya, perbaikan sarana dan prasarana, serta penyesuaian kebijakan teknis yang lebih adaptif agar pelayanan publik di bidang pemakaman dapat terlaksana secara lebih konsisten, berkelanjutan, dan sesuai dengan tujuan kebijakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Edwards, G. C. (1980). *Implementing public policy*. Congressional Quarterly Press.
- Goggin, M. L., Bowman, A. O., Lester, J. P., & O'Toole, L. J. (1990). *Implementation theory and practice: Toward a third generation*. Scott, Foresman and Company.
- Grindle, M. S. (1980). *Politics and policy implementation in the Third World*. Princeton University Press.
- Hardiyanto. (2023). Implementasi kebijakan pengelolaan tempat pemakaman umum di Kota Bandung. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(2), 123–138.

- Pemerintah Kota Bandung. (2023). Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pelayanan Pemakaman Umum. Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Pikiran Rakyat. (2025). Wali Kota Bandung perintahkan pemberantasan pungli di layanan pemakaman. Pikiran Rakyat.
- RRI Bandung. (2025). Minim sosialisasi, warga belum paham pemakaman gratis di Kota Bandung. Radio Republik Indonesia.
- Sugiyono. (2019). Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D. Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Winoto, Y., Aulia, H. S., & Selfa. (2022). Alih fungsi lahan tempat pemakaman umum dan implikasinya terhadap tata ruang perkotaan. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, 17(1), 45–60.